



## ***Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung**

**Zulhadi<sup>1</sup>, Andi Pitono<sup>2</sup>, Ella L. Wargadinata<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor

Email: [Zulhadi.L4190@gmail.com](mailto:Zulhadi.L4190@gmail.com)

### **Abstrak**

Sungai Citarum Merupakan Sungai Terpanjang Di Jawa Barat Mengalami Permasalahan Yang Sangat Serius, Sungai Citarum Termasuk Salah Satu Sungai Terkotor Di Dunia. Permasalahan Sungai Citarum Sangat Kompleks Mulai Dari Hulu Sampai Hilir. Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Kolaborasi Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum Di Kabupaten Bandung Yang Merupakan Wilayah Bagian Hulu Dari Sungai Citarum. Hasil Penelitian Menunjukkan Proses Kolaborasi Yang Dibangun Berjalan Cukup Baik Berdasarkan Dimensi *Collaborative Governance* Ansell Dan Gash. Dengan Adanya Kolaborasi Yang Dibangun Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum Di Kabupaten Bandung Terlihat Hasil Yang Dicapai, Antara Lain: Kawasan Hutan Di Hulu Sungai Citarum Kembali Hijau, Baku Mutu Air Sungai Citarum Yang Meningkatkan Dan Membaiknya Indeks Kualitas Air Sungai Citarum Dari Tercemar Berat Menjadi Tercemar Ringan. Namun Proses Kolaborasi Yang Dibangun Antara Pemerintah Dan Masyarakat Masih Dirasa Kurang Karena Belum Adanya Keterlibatan Pihak Swasta Sehingga Hasil Yang Dicapai Dari Kolaborasi Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum Masih Belum Bisa Maksimal Sepenuhnya.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Citarum Harum

### **Abstract**

The Citarum River Is The Longest River In West Java Experiencing Very Serious Problems, The Citarum River Is One Of The Dirtiest Rivers In The World. The Problem Of The Citarum River Is Very Complex From Upstream To Downstream. This Research Uses Qualitative Methods With The Aim Of Research To Find Out How The Collaboration Process In The Management Of The Citarum Harum Area In Bandung Regency Which Is The Upstream Area Of The Citarum River. The Results Showed That The Collaboration Process That Was Built Went Quite Well Based On The Dimensions Of Collaborative Governance Ansell And Gash. With The Collaboration Built Between The Government And The Community In The Management Of The Citarum Harum Area In Bandung Regency, The Results Have Been Achieved, Including: The Forest Area Upstream Of The Citarum River Is Green Again, The Citarum River Water Quality Standards Have Increased And The Improvement In The Citarum River Water Quality Index From Heavily Polluted To Lightly Polluted. However, The Collaboration Process Built Between The Government And The Community Is Still Felt To Be Lacking Because There Is No Involvement Of The Private Sector So That The Results Achieved From Collaboration In The Management Of The Citarum Harum Area Still Cannot Be Fully Maximized.

**Keywords:** *Collaborative Governance*, *Citarum Harum*

## PENDAHULUAN

Kondisi tofografi Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan pegunungan ditengahnya umumnya sungai di Indonesia pendek dan curam, sehingga menjadikan sungai di Indonesia rentan terhadap berbagai masalah. Ancaman kerusakan Daerah aliran sungai (DAS) tidak hanya dikarenakan oleh faktor geologi dan tofografi saja, namun juga ancaman kerusakan DAS timbul akibat dari kelalaian manusia. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat saat ini mengalami ancaman kerusakan, Dikutip dari ([dbmtr.jabarprov.go.id](http://dbmtr.jabarprov.go.id)) sungai Citarum memiliki sejumlah permasalahan, beberapa di antaranya berada di wilayah tengah, sementara yang lain tersebar di seluruh aliran sungai. Daerah hulu sungai yang subur mulai dimanfaatkan untuk perkebunan, sehingga hutan dan daerah resapan air di hulu hilang secara besar-besaran. Akibatnya terjadi limpasan, sehingga menimbulkan sedimen yang tinggi. Deforestasi yang cepat di wilayah hulu dan tengah sungai, tercemarnya sungai oleh limbah industri dan domestik, membuat kondisi kawasan hilir Sungai Citarum semakin mengkhawatirkan.

Bahkan menurut Bank Dunia National *Geographic* Indonesia (2018) sungai Citarum mendapat predikat sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. dan sempat menjadi topik pembahasan di media sosial seperti yang pernah di tweet oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pegiat lingkungan Gary Bencheghib melalui akun facebook-nya "*Make A Change World*", dan bahkan kondisi Citarum sebagai mendapat sorotan dari media internasional ([Republika.co.id](http://Republika.co.id)). Kondisi kerusakan Daerah aliran sungai (DAS) sungai Citarum yang memprihatikan dari hulu hingga hilir tentunya akan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Permasalahan sungai Citarum sangat kompleks dimulai dari hulu yang aliran pertama sungai Citarum bersumber dari beberapa mata air yang ada di kawasan Situ Cisanti. Kawasan hulu sungai Citarum memegang peranan penting terhadap kualitas lingkungan sungai Citarum secara keseluruhan, hulu sungai Citarum yang mempunyai kandungan vulkanis dengan topografi berbukit dan beriklim pegunungan sangat mendukung dikembangkannya budidaya pertanian, namun dikarenakan kurangnya pengelolaan tanpa memperhatikan keselarasan lingkungan menyebabkan makin meluasnya lahan kritis di hulu sungai Citarum.

Berdasarkan data ([citarum.bappenas.go.id](http://citarum.bappenas.go.id)) total kerusakan lahan kritis di wilayah sungai Citarum mencapai luas 884.560 Ha, dengan persentase tingkat erosi (>180 ton/Ha/th) sebesar 31.4% dari luas wilayah sungai Citarum. Erosi di hulu DAS Citarum mengirimkan beban lumpur minimal 256 ton/ha/tahun dan dapat diklasifikasikan sebagai indeks erosi sangat buruk. Di sisi lain, proporsi sedimentasi yang mengalir ke sungai itu sendiri mencapai 9,48 juta ton/tahun. Kurangnya penanganan limbah ternak tercatat sebanyak 33.350 ton nitrogen dan 4.370 ton fosfor masuk ke badan sungai Citarum.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaningtias menyatakan bahwa jumlah sampah di Jawa Barat per harinya mencapai 35.000 ton dengan komposisi organik 60% dan anorganik 40%. Adapun timbunan sampah di Kawasan DAS Citarum sebanyak 15.838 ton per hari dengan jenis sampah organik sebesar 55% dan anorganik sebesar 45% ([Citarumharum.jabarprov.go.id](http://Citarumharum.jabarprov.go.id)).

Pemerintah saat ini menghadapi tantangan dan permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS) Citarum, mulai dari deforestasi hutan, sedimentasi, sampah, limbah ternak, limbah domestik serta limbah industri sampai dengan persoalan tata ruang dibantaran sungai Citarum, oleh karena kompleksnya permasalahan DAS Citarum, maka penanganannya tidak dapat lagi dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah. Saat ini belum ada instansi tunggal yang dapat menyelesaikan permasalahan DAS Citarum dari hulu hingga hilir secara optimal, untuk itu dalam upaya normalisasi sungai Citarum perlu adanya kolaborasi yang benar-benar terjalin dengan kuat antar pihak-pihak yang terlibat.

Beberapa program normalisasi Citarum pernah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada periode 2000-2003, ada program "*Citarum Bergetar*". Kata "*bergetar*" singkatan dari bersih, geulis (cantik dalam bahasa Sunda), dan lestari. Program Citarum Bergetar berfokus pada pengendalian pemulihan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun program ini belum optimal mengatasi pencemaran sungai

Citarum dan berjalan tanpa diketahui tingkat keberhasilannya, terindikasi adanya tumpang tindih regulasi yang menjadi penyebab.

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mencanangkan program pemulihan dengan nama "Citarum Bestari", akronim dari bersih, sehat, indah, lestari. Lewat Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 75 Tahun 2015, gerakan Citarum Bestari resmi diluncurkan. Anggaran sekitar Rp 80 miliar pun disiapkan demi memuluskan jalan menggapai target Citarum Bestari. Targetnya, tahun 2018 air Sungai Citarum bisa diminum langsung. Tetapi, sampai saat ini kualitasnya belum memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan, sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumsi (dbmtr.jabarprov.go.id).

Berbagai upaya yang dilakukan sebelumnya, dengan mencanangkan berbagai program pengelolaan daerah aliran sungai Citarum namun belum mampu memberikan dampak yang optimal dalam menyelesaikan persoalan sungai Citarum. Terindikasi adanya tumpang tindih regulasi, seperti dikutip dari hasil penelitian Sam'un Jaja Raharja (Disertasi, Universitas Indonesia, 2008) mengemukakan bahwa *pertama* pengelolaan daerah aliran sungai Citarum menunjukkan model independen dan sektoral, *kedua* relasi antar organisasi dalam pengelolaan DAS Citarum secara keseluruhan belum terstruktur sehingga peran dan fungsi organisasi tumpang tindih, *ketiga* setiap stakeholder cenderung berposisi pada sudut pandang atau kepentingan sendiri.

Ketiadaan tata kelola bersama mengakibatkan tidak adanya responsibilitas dan akuntabilitas di setiap organisasi yang seharusnya menjadi tugas pokok, fungsi dan kewajibannya. Interaksi antar aktor yang belum berjalan dengan baik sebagaimana penanda proses kolaborasi hal ini berarti proses kolaborasi belum terbentuk sebagaimana mestinya.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Governence**

Sebelum ke pembahasan mengenai *Collaborative Governence*, perlu terlebih dahulu membahas mengenai governace, karena istilah *governance* menjadi dasar dari konsep *Collaborative Governence*. Dalam ilmu pemerintahan sering muncul istilah *government* dan *governance*, kedua istilah tersebut hampir sama namun memiliki makna yang berbeda.

Menurut Chema dalam Keban (2008:38) mengatakan bahwa *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5).

Dalam proses *governance* terdapat 3 aktor yang berpengaruh yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi (Abidarin dkk, 2013). Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha swasta melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan juga dilakukan pemerintah dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan kolaborasi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melibatkan tiga aktor utama governan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Irawan, 2017).

Ketiga aktor tersebut di atas berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan pengendalian serta pengawasan. Sektor swasta lebih banyak terlibat sebagai penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan

masyarakat merupakan objek sekaligus juga subjek dari pemerintah maupun sektor swasta, karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

## 2. Collaborative Governance

Perkembangan tata kelola pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaboratif) menjadi *trend* dan fenomena baru yang menarik diteliti dan dikaji. *Collaborative governance* sendiri telah dikembangkan selama dua dekade terakhir, *Collaborative governance* merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara *government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitarianisme dan demokrasi yang melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam pelaksanaan kebijakan publik dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*.

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Gash "*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*" (Ansell dan Gash, 2007:545). *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatau yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Kolaborasi dapat dipahami sebagai Kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi untuk mencapai tujuan tidak bisa dilakukan secara independent. Menurut Abdulsyani dalam sosiologi skematika (2007) kolaborasi adalah suatu hal yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan Bersama, dan dilaksanakan dengan pembagian tugas secara menyeluruh dengan pertanggungjawaban yang ditugaskan kepada masing-masing komponen tersebut. Lebih lanjut abdulsyani juga menambahkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan Bersama serta saling membantu dan memfasilitasi kegiatan masing-masing.

Anderson (2004:76) mengatakan bahwa suatu hal yang membedakan kolaborasi dan Kerjasama adalah kolaborasi memiliki tenggang waktu yang lebih lama dan prosesnya selalu berkesinambungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sedangkan kerjasama memiliki waktu yang relatif lebih singkat dan akan berakhir setelah tercapainya tujuan dari salah satu pihak.

Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah-istilah ini. Menurut definisi, para ahli mendefinisikan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) adalah berbicara mengenai ide pokok kerjasama antara sektor publik dan non-publik atau swasta dalam pengelolaan pemerintahan atau *governence*. Ansell dan Gash (2007:546) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut ini:

*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai *collaborative governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan sebagai berikut:

Secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

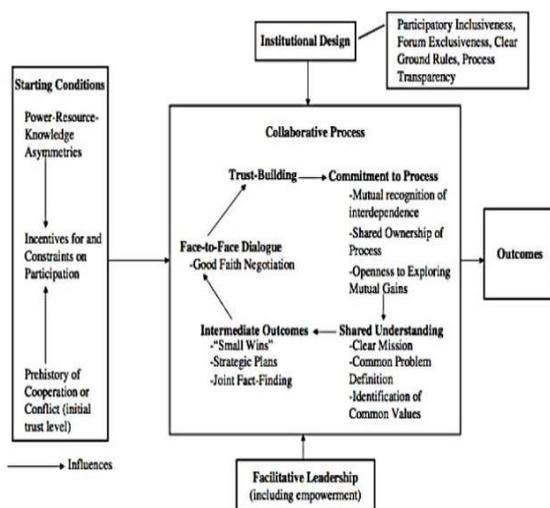
Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah mendefinisikan *collaborative governance* dalam gagasan yang sama. Akan tetapi pada penjelasan Ansell dan Gash dapat dilihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan implemtasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

### 3. Model dan Proses Collaborative Governance Ansell dan Gash

Proses kolaboratif ini merupakan variable yang penting, dimana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para stakeholders tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para stakeholders memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

Ansell dan Gash mendefinisikan 3 (tiga) tahapan proses kolaborasi yaitu *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan pelaksanaan. Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi.

Berikut ini gambar model kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007):



Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Teori yang merujuk pada Model *Collaborative Governance* yang di kemukakan oleh Ansell and Gash (2007). Adapun alasan peneliti menggunakan teori ini berdasarkan pada fokus penelitian yang ingin mengamati secara empiris terkait dengan model *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. dikarenakan dalam model ini menawarkan 3 dimensi kolaborasi yaitu: *pertama*, faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi (1)

dimulai dengan kondisi awal pembentukan dan penataannya, (2) keadaan kelembagaan sebagai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum, (3) kepemimpinan dalam pengelolaannya. *Kedua*, Proses kolaborasi yang terdiri dari (1) dialog tatap muka, (2) membangun kepercayaan, (3) komitmen terhadap proses, (4) berbagi pemahaman. Dan *ketiga*, hasil sementara atau outcome yang dicapai dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung.

Dari tiga dimensi tersebut maka penulis menilai akan sangat sesuai apabila digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung dengan berbasis *Collaborative Governance*.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi serta menemukan suatu masalah yang terjadi pada subjek dan objek penelitian. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2006:12) objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, sehingga metode kualitatif juga disebut metode penelitian naturalistik. Menurut Nazir (2009:8) metode kualitatif merupakan suatu metode dalam penelitian yang naturalistik, sebab dalam penelitian ini dilaksanakan pada suatu situasi alamiah atau natural, metode ini juga disebut sebagai metode etnografi sebab pada mulanya metode ini banyak digunakan meneliti suatu peristiwa atau permasalahan yang menyangkut bidang antropologi budaya, selanjutnya metode ini disebut sebagai kualitatif sebab data yang diperoleh peneliti akan dikumpulkan dan dianalisis dengan sifat kualitatif.

Sedangkan metode deskriptif, yaitu: metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana adanya. Menurut Nazir (2009:54) deskriptif memiliki arti menggambarkan suatu hal, sehingga metode deskriptif dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan peneliti untuk meneliti permasalahan yang mencakup manusia, objek, kondisi, sistem, pemikiran ataupun peristiwa yang kemudian digambarkan berdasarkan foto atau gambar yang didapatkan ataupun dengan kata-kata. Tujuan dari metode deskriptif adalah guna memberikan gambaran secara faktual dan akurat mengenai suatu peristiwa yang menjadi fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Kolaborasi**

#### **1. Dialog Tatap Muka**

Proses dialog tatap muka yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum di sektor 1 dilakukan oleh berbagai stakeholder terkait dengan berbagai cara, antara lain: *pertama*, oleh Satgas Citarum Harum selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem di DAS Citarum, anggota satgas terpadu tinggal bersama masyarakat dan melakukan pendampingan, dalam dialog tatap muka Satgas mendatangi langsung masyarakat yang berada disekitar wilayah DAS Citarum, pemberian edukasi dan pembinaan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dilakukan setiap hari bersamaan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan rutin satgas Citarum Harum. Selain mendatangi langsung masyarakat secara *door to door* edukasi dan pembinaan kepada masyarakat juga dilakukan Satgas Citarum Harum bersama dengan tokoh masyarakat, pemerintah Desa Tarumajaya dan Pemerintah Kecamatan Kertasari seperti pada saat acara hari-hari besar di masjid-masjid dan di balai pertemuan Desa dan RW.

*Kedua*, dialog tatap muka selain kepada masyarakat juga dilakukan dengan sektor bisnis, dalam memberikan edukasi dan pembinaan Satgas Citarum Harum mendatangi langsung tempat pelaku usaha penyuluhan dilakukan bersama dengan Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup, pemberian edukasi dan pembinaan adalah bagaimana cara mengelola limbah cair yang

dihasilkan oleh peternakan ataupun limbah industri, serta bagaimana pemanfaatan tata ruang di bibir sungai untuk penguatan bantaran sungai dari erosi dengan melakukan penanaman pohon serbaguna (buah-buahan). Selain mendatangi langsung tempat-tempat pelaku usaha Satgas Citarum bersama DLH juga aktif melakukan sidak dari hasil pelaporan Badega Lingkungan, Gober dan masyarakat, dan ketika ditemukan adanya pelanggaran dialog tatap muka dilakukan dengan memanggil pelaku usaha ke kantor DLH untuk kemudian dilakukan edukasi dan pembinaan serta kemudian pemberian surat peringatan untuk segera mengelola limbah tersebut.

## **2. Membangun Kepercayaan**

Berdasarkan wawancara dengan Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 1 dalam membangun kepercayaan publik maupun institusi lain adalah dengan melibatkan masyarakat setempat ikut terlibat dalam pelaksanaan program Citarum Harum. Masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program Citarum Harum direkrut dan dibina oleh satgas terpadu (TNI), satuan masyarakat yang berasal dari daerah disekitar wilayah Sektor 1 Citarum Harum ini tergabung dalam GOBER (Gotong Royong Bersama), Gober sendiri dalam pelaksanaannya merupakan mitra dari Satgas Citarum Harum dan ikut terlibat dalam semua kegiatan Satgas, Gober juga merupakan penyambung lidah antar masyarakat dan Satgas, selain itu keterlibatan Gober pada dasarnya adalah masyarakat setempat itu sendiri yang paling tahu dan memahami akan situasi dan kondisi daerahnya.

Dalam kegiatan sehari-hari Satgas dan Gober terus memberikan arahan dan contoh kongkret kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di wilayah DAS Citarum Sektor 1. Seperti pembersihan sampah yang masih dibuang sembarangan dipinggir-pinggir jalan maupun badan sungai Citarum, penanaman pohon dilahan-lahan kritis, dengan adanya Gober diharapkan juga dapat memberikan contoh langsung kepada masyarakat untuk memulai perilaku hidup bersih dan sehat, dimana Gober dapat memulai berperilaku hidup bersih dan sehat dari rumah masing-masing anggotanya.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan, dalam membangun kepercayaan kepada publik Dinas Kehutanan memberikan contoh kongkret dengan adanya masyarakat binaan sebagai percontohan, masyarakat binaan ini adalah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari penyuluh kehutanan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lahan hutan, dalam melakukan konservasi hutan masyarakat juga masih bisa mendapatkan penghasilan yaitu dengan budidaya jamur kayu dan budidaya lebah madu yang lebih bernilai ekonomis. Dengan adanya contoh kongkret dan hasil yang didapatkan diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat lain untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan lahan konservasi.

## **3. Komitmen Terhadap Proses**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satgas Citarum Harum Sektor 1 dalam menguatkan komitmen terhadap proses antar stakeholder yaitu dengan adanya adanya rapat kordinasi dan rapat evaluasi terkait dengan proses dan progres dari pelaksanaan program Citarum Harum, rapat kordinasi biasanya dilakukan melalui zoom meeting ataupun undangan langsung dari Gubernur Jawa Barat dan dari kementerian atau dinas terkait seperti Dinas PUPR, selain itu juga adanya kunjungan ke wilayah Sektor 1 pengecekan lapangan seperti dari BBWS, KLHK serta dinas-dinas terkait baik Provinsi maupun Kabupaten.

Satgas Citarum Harum Sektor 1 bersama dengan Gober terus menjaga komitmen dalam kolaborasi pengelolaan kawasan Citarum Harum, salah satunya adalah dengan pemberian sanksi dan teguran kepada masyarakat yang kedapatan membuang sampah ke sungai Citarum, sanksi berupa peringatan dan menyuruh untuk mengambil kembali sampah yang dibuang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 1 mengatakan kita ini adalah pelayan masyarakat sudah tugas kita untuk membersihkan sampah-sampah yang ada disekitar sungai Citarum, namun kita tidak

selamanya akan melayani mereka dan nanti masyarakat harus bisa mandiri dan harus punya tanggungjawab dalam menjaga lingkungannya sendiri.

Disini bisa dilihat bahwa ketegasan seorang prajurit TNI menunjukkan komitmen yang kuat yang mereka miliki dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban, sehingga dapat memberi contoh dan pengaruh terhadap setiap aspek disekitarnya.

#### 4. Pemahaman Bersama

Dalam memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait program Citarum Harum, Satgas Citarum Harum Sektor 1 sebagai pelaksana tugas lapangan dalam normalisasi sungai Citarum sangat menekankan pemberian pemahaman kepada masyarakat sekitar sungai Citarum. Edukasi sosialisasi terus menerus diberikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan sungai Citarum sebagai warisan kepada anak cucu di masa depan.

Satgas Citarum Harum bersama Guber terus bekerja memberikan contoh kepada masyarakat dalam memelihara sungai citarum, penekanan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai Citarum diharapkan dapat membentuk *mindset* masyarakat sebagai pemilik sungai Citarum yang harus dijaga kelestariannya. Sehingga saat program Citarum Harum telah selesai *mindset* masyarakat sudah terbentuk dan bisa mengambil alih tanggungjawab dalam menjaga kelestarian sungai Citarum.

Pentingnya upaya penekanan kepada masyarakat akan pemahaman untuk menjaga kelestarian lingkungan sungai Citarum juga didukung oleh Perum Perhutani, sebagai pemilik lahan hutan yang berada dikawasan Gunung Wayang (titik nol sungai Citarum) peran dari Perhutani dalam mendukung keberhasilan Program Citarum Harum sangat diharapkan bentuk tindakan nyatanya dalam berkolaborasi baik dengan pemerintah ataupun masyarakat.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari Perhutani KPH Bandung Selatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sungai Citarum, dilakukan upaya dengan beberapa pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan peningkatan kesadaran dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, pembentukan dan penguatan kelompok, *kedua*, pendekatan kesejahteraan dengan mendorong pengembangan komoditas tanaman yang berfungsi ekologis baik dan juga bernilai ekonomis tinggi, *ketiga*, pendekatan penegakan keamanan dengan melakukan patrol dan penegakan hukum.

Dalam upaya mewujudkan pemahan bersama akan tujuan dari Program Citarum Harum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung memberikan dukungan untuk pengelolaan sampah agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah ke sungai Citarum ataupun tempat-tempat lain tanpa dikelola terlebih dahulu.

Dukungan yang berikan oleh DLH Kabupaten Bandung berupa sarana dan prasarana pengelolaan sampah TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) berdasarkan inisiasi dari Pemerintah Desa dan Satgas Citarum Harum.

Dari dimensi pemahaman bersama ini, bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, tiap-tiap stakeholder sudah memahami benar-benar tujuan akan capaian dari kolaborasi yang dilakukan. Namun dalam kenyataannya memang hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tidak mudah dan butuh proses dan waktu yang panjang, saat pengamatan dilapangan peneliti masih menemukan adanya sampah yang dibuang di sungai Citarum terutama saat musim penghujan ketika debit sungai Citarum naik sampah-sampah banyak yang dibawa hanyut di sungai Citarum, dan tanah-tanah perkebunan yang mengalami erosi. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dan memang merubah mindset semua orang sangatlah susah tidak semudah membalikkan telapak tangan tapi butuh waktu dan proses yang panjang.

#### 5. Hasil Sementara

Dari proses kolaborasi dalam pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten sudah terlihat hasil yang didapat dan dirasakan oleh masyarakat. berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mengatakan saat ini pencemaran sungai citarum sudah mulai teratasi, sudah mulai terlihat hasilnya indeks kualitas air sungai Citarum sudah meningkat, dari sebelumnya tercemar berat sekarang sudah menjadi tercemar ringan. Peningkatan kualitas air sungai Citarum juga dapat dilihat dari warna air sungai Citarum yang sebelumnya hitam saat ini sudah berubah menjadi kecoklatan.

Peningkatan kualitas air sungai Citarum didapat dengan proses yang panjang setelah adanya kolaborasi antar berbagai pihak dalam pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. Terkontrolnya pembuangan limbah cair industri menjadi salah satu kunci meningkatnya kualitas air sungai Citarum, dengan adanya kolaborasi yang dilakukan DLH Kabupaten Bandung, Satgas Citrum Harum dan masyarakat sehingga pengawasan, pembinaan serta penegakan hukum terkait pembuangan limbah industri dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 1 hasil yang telah dicapai dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan Kawasan Citarum Harum saat ini sudah mulai bisa dirasakan masyarakat. Kawasan hutan sudah mulai hijau kembali, mata air sungai Citarum PHnya sudah memenuhi baku mutu air untuk bisa diminum, tata ruang sungai Citarum sudah kembali fungsinya dengan ditanami pohon-pohon mencegah erosi, DAS Citarum sudah bersih bebas dari sampah yang dibuang oleh masyarakat ataupun pengunjung wisata Situ Cisanti. Kawasan wisata hutan Situ Cisanti sudah terkelola dengan baik bebas dari para pemancing liar yang dapat merusak ekosistem disekitar Situ Cisanti.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti outcomes atau hasil dari proses kolaborasi bisa dikatakan berhasil sesuai dengan apa yang ingin dicapai dari adanya kolaborasi dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung yaitu sungai Citarum yang bersih dan bebas dari pencemaran. Walaupun hasilnya belum bisa dikatakan 100% tapi sudah ada progres yang luar biasa dicapai dari kondisi sebelum adanya Program Citarum Harum.

## **B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Kolaborasi**

### **1. Kondisi Awal**

#### **a. Ketidakseimbangan Sumber Daya**

Dalam tahapan ini peneliti menemukan ketidakseimbangan sumberdaya manusia yaitu dimana Satgas Citarum Harum yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat lebih terfokus pada TNI sebagai aktor pelaksana harian atau pelaksana lapangan dalam pengendalian pencemaran kerusakan DAS Citarum, berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 1 hal ini dikarenakan salah satu alasannya adalah Gubernur Jawa Barat tidak memiliki cukup personel untuk diturunkan sebagai pelaksana lapangan Satgas Citarum Harum, sehingga pelaksana lapangan Satgas Citarum Harum dilimpahkan kepada Kodam Siliwangi III.

Disisi lain ketidakseimbangan sumberdaya juga terjadi pada aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung terkhusus di Sektor 1 kertasari, disini peneliti menemukan tidak adanya keterlibatan secara langsung dari pihak Swasta (sektor bisnis), sehingga kolaborasi hanya melibatkan sektor pemerintah dan masyarakat saja.

Berdasarkan keterangan dari Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 1 dari pihak sektor bisnis yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum Sektor 1 hanya BUMN yaitu (Perhutani dan PJT II).

#### **b. Ketersediaan insentif untuk berpartisipasi**

Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum di Sektor 1 dapat terjadi juga dipengaruhi oleh insentif atau manfaat yang akan

didapat oleh para aktor yang terlibat, Perhutani dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum mendapatkan kembali lahan atau hutan yang sebelumnya alih fungsi menjadi pertanian dapat kembali menjadi wilayah hutan konservasi, masyarakat yang mau ikut terlibat secara langsung dalam kolaborasi dengan pemerintah dan sektor bisnis dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum juga mendapatkan manfaat ganda, selain ikut menjaga lingkungannya sendiri dengan menjadi mitra dari pemerintah masyarakat juga mendapatkan uang saku sebagai honor.

c. Adanya ketakutan terjadinya konflik

Ketakutan terjadinya konflik tidak hanya pada antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sungai Citarum tetapi juga pada masyarakat yang berada disekitar wilayah DAS Citarum. Berdasarkan hasil wawancara dengan komandan Satgas Citarum Harum Sektor 1 potensi konflik yang terjadi ada pada masyarakat yang lahan garapannya yang dialihfungsikan kembali untuk penghijauan hutan dan wilayah pemukiman masyarakat yang berada disekitar bantaran DAS Citarum. Konflik-konflik kecil yang terjadi seperti penolakan relokasi dan alih fungsi lahan dengan dasar belum tersedianya lahan garapan baru ataupun sumber mata pencaharian yang lain, disinilah peran dari Satgas Citarum Harum (TNI) sebagai pengkondisian sosial tertib masyarakat.

Selain itu potensi konflik dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum juga terjadi antara pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dengan sektor Swasta (Industri), ketaatan pihak industri dalam pengelolaan limbah sangat berpengaruh pada komitmen dari DLH dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada para pelanggar yang membuang limbah tanpa pengelolaan terlebih dahulu sesuai dengan standar baku mutu.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti ketakutan akan terjadinya konflik sangat berpengaruh pada kolaborasi yang terjadi, adanya kesadaran dari setiap stakeholder akan terjadinya konflik mendorong pengakuan untuk melakukan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum.

## 2. Desain Kelembagaan

Sebuah program atau kebijakan sudah pasti mempunyai dasar hukum sebagai landasan dalam melaksanakan program kebijakan tersebut, sehingga aturan serta fungsi-fungsi dan tujuan dari adanya suatu program kebijakan sudah terarah dengan jelas. Begitu juga dengan program pengendalian pencemaran kerusakan DAS Citarum (Citarum Harum) di Kabupaten Bandung, disini penulis akan mengkaji beberapa instrument hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum dari kebijakan program tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Citarum.
- b. Pasal 12 Peraturan Presiden No 15 Tahun 2018 menjelaskan pelibatan kementerian dan lembaga diamanatkan untuk memberikan dukungan pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dalam berbagai aspek.
- c. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum tentang penunjukan ketua harian Satgas Citarum.

## 3. Kepemimpinan Fasilitatif

Pada poin pembahasan ini, penulis memfokuskan pada mediasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sektor swasta, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pemerintah (DLH) dalam berkolaborasi dengan masyarakat pemerintah membuat terobosan dengan adanya kontak center pengaduan via *Whatsapp* atau *Instagram* terkait dengan pencemaran lingkungan, baik itu terkait sampah liar yang dibuang di sungai dan dipinggir jalan, adanya pembakaran, dan terkait pelanggaran industri dalam membuang limbah ke sungai Citarum, informasi pengaduan yang masuk dari masyarakat

nantinya akan direspon oleh tim Reaksi Cepat Tanggap DLH untuk langsung ditindaklanjuti. Dengan adanya kontak center pengaduan tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dari pencemaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Satgas Sektor 1 peran pemimpin dalam memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah dengan membentuk mitra kelompok masyarakat Giber (Gotong Royong Bersama), dengan adanya Giber kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Sektor 1 dapat terjalin dengan kuat, Giber ini adalah tangan kanan dari Satgas Citarum Harum yang diharapkan akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat disekitar tempat tinggalnya sebagai contoh untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang didapat oleh penulis, dapat dilihat peran pemimpin dalam kolaborasi sudah baik, namun masih belum berjalannya kolaborasi ataupun Kerjasama yang dijalin antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Sektor 1 masih menjadi nilai kurang sehingga capaian hasil dari tujuan kolaborasi dalam pengelolaan Kawasan Citarum Harum masih belum maksimal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari wawancara, pengamatan, dan data sekunder dari kolaborasi pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung (Citarum Harum Sektor 1) yang kemudian diolah oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar proses kolaborasi yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik berdasarkan dimensi Collaborative Governance Anshel dan Gash. Namun dalam proses kolaborasi pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung khususnya (Citarum Harum Sektor 1) hanya melibatkan antara pemerintah dan masyarakat saja, disini dalam proses kolaborasi peran dari pemerintah terlihat sangat dominan, sedangkan kolaborasi dengan pihak swasta belum terlihat.

Adapun hasil yang dicapai dari kolaborasi dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung (Citarum Harum Sektor 1) sudah mulai terlihat hasil nyata yang dicapai, antara lain: Kawasan hutan di hulu sungai Citarum sudah kembali hijau menjadi hutan konservasi, PH mata air sungai Citarum sudah meningkat dan memenuhi baku mutu untuk diminum, penataan ruang di bantaran sungai citarum sudah berangsur membaik selain adanya penanaman pohon di beberapa titik juga menggunakan tembok beton atau beronjong kawat untuk penahan dari erosi, dengan pengelolaan limbah ternak dengan pembuatan ipal komunal serta pengelolaan sampah dengan pembuatan TPS3R secara nyata sudah mempengaruhi meningkatnya indeks kualitas air sungai Citarum.

Dengan adanya hasil yang telah dicapai tersebut bisa dikatakan secara keseluruhan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung khususnya di Citarum Harum Sektor 1 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan dimensi Ansell dan Gash. Tetapi masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal lagi, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis masih adanya masyarakat yang membuang sampah liar (dipinggir jalan ataupun ke badan sungai Citarum), masih banyak titik-titik bantaran sungai yang rawan erosi ataupun longsor dikarenakan sistem pengolahan lahan yang tidak konservatif dan masih belum optimalnya penataan ruang bantaran sungai Citarum dari bangunan tempat tinggal masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.  
Abidar, Rosidi dkk. 2013. *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.

Anderson, E.T & J. McFarlane. 2004. *Community as Partner Theory and Practice in Nursing 4th E.d Philadelphia*.  
 Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory Vol 18.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Indrawan, Rully. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Surabaya : Refika Aditama.

Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Nazir, Moh. Ph.D. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Raharja, Sam'un Jaja. 2008. (Disertasi) *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah aliran Sungai Citarum*. Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Citarum.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata kelola pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum.

<http://dbmtr.jabarprov.go.id/sungai-citarum-1-tempat-sampah-raksasa-yang-mendunia/> diakses pada tanggal 04 Juni 2022

<https://www.jabarpublisher.com/index.php/2017/12/01/visi-citarum-harum-kodam-iii-siliwangi-bentuk-satgas-komando/> 10 Juni 2022

<https://nasional.okezone.com/read/2017/03/22/337/1648855/hari-air-sedunia-kondisi-sungai-di-indonesia-memprihatinkan#:~:text=MALANG%20%2D%20Indonesia%20memiliki%20sedikitnya%205.590,mencapai%201.512.466%20kilometer%20persegi>. diakses pada tanggal 26 Juli 2022

<http://citarum.bappenas.go.id/info-citarum/berita-artikel/1864-kompleksitas-citarum-dimulai-dari-hulu.html> diakses pada tanggal 30 Juli 2022